

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 7, Nomor 2, Januari - Juni 2015

Diterbitkan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS)

Sekretariat: Nurcholish Madjid Society

Graha STR, Lt. 4, Jl. Ampera Raya No. 11, Kemang

Jakarta Selatan 12550

E-mail: titik.temu@yahoo.com

Pemimpin Redaksi

Kautsar Azhari Noer

Wakil Pemimpin Redaksi

Muhamad Wahyuni Nafis

Sekretaris Redaksi

Fachrurozi • Rahmat Hidayatullah

Redaktur Pelaksana

Sunaryo

Dewan Redaksi

Budhy Munawar-Rachman • Fachrurozi • Kautsar Azhari Noer •
Moh. Monib • Muhamad Wahyuni Nafis • Rahmat Hidayatullah •
Sunaryo • Yudi Latif • Zainun Kamal

Pewajah Sampul

Taqi Kanara

Pewajah Isi

Moh. Syu'bi

Titik-Temu terbit setiap enam bulan. Redaksi menerima tulisan ilmiah dari kalangan manapun dan berhak menyunting, memperbaiki dan menyempurnakan naskah tulisan yang diterima. Naskah tulisan berkisar antara 15-25 halaman ukuran A-4 dengan ketikan spasi ganda dan dikirim via e-mail.

TITIK-TEMU, Vol. 7, No. 2, Januari - Juni 2015

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 7, Nomor 2, Januari - Juni 2015

DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi	1
Daftar Surat al-Qur'an	3-4
Makna Puasa	5-6
Pengantar	7-11

SAJIAN KHUSUS

Hipotesis Tentang Fase Perubahan Pemikiran Nurcholish Madjid <i>Fachry Ali</i>	15-26
Gerakan Islam Kultural Paramadina: Fundamentalisme Agama dan Masa Depan Keislaman dan Keindonesiaan <i>M. Dawam Rahardjo</i>	27-37

ARTIKEL

Bagaimana Seharusnya Memperlakukan Agama-agama di Era Sains Modern? <i>Ioanes Rakhmat</i>	41-71
Pemetaan Hubungan Sains dan Agama dalam Perspektif Kemanusiaan <i>Husain Heriyanto</i>	73-102

DAFTAR ISI

Mencari Titik-Temu Agama dan Sains: Sebuah Perspektif Islam <i>Kautsar Azhari Noer</i>	103-134
Sinergi Pluralisme dan Hak Asasi Manusia dalam Menjaga Nilai-nilai Kemanusiaan <i>Zulfan Taufik</i>	135-159
Islam dan Hak Asasi Manusia <i>Yohanes D. Anugrahbayu</i>	161-174
Studi Perbandingan Agama <i>Mahatma Gandhi</i>	175-179

RESENSI BUKU

Pendekatan Sekuler kepada Kearifan Buddha Gautama <i>Jonathan Wood</i>	183-190
---	---------

MAKLUMAT

Susunan Pengurus Nurcholish Madjid Society	193-194
Ucapan Terima Kasih	195
Berlangganan <i>Titik-Temu</i>	196

GERAKAN ISLAM KULTURAL PARAMADINA

Fundamentalisme Agama dan Masa Depan Keislaman dan Keindonesiaan

M. Dawam Rahardjo

Yayasan Paramadina didirikan pada tahun 1986, lebih dari dua dasawarsa sejak dimulainya proses modernisasi yang diusung oleh Pemerintah Orde Baru. Gagasan modernisasi pada awalnya dipersepsikan sebagai Westernisasi. Persepsi itu adalah proses kemasyarakatan yang berorientasi pada nilai-nilai kebudayaan Barat yang dianggap lebih maju. Intinya, modernisasi, menurut Sutan Takdir Alisyahbana dalam artikelnya yang terbit pada tahun 1936 di masa Hindia Belanda, adalah trilogi individualisme, materialisme dan intelektualisme. Tetapi persepsi umum itu ditanggapi secara kritis oleh seorang cendekiawan muda yang kala itu masih mahasiswa, Nurcholish Madjid sebagai rasionalisasi, walaupun rasionalisme juga merupakan bagian dari filsafat Barat. Nurcholish Madjid sendiri, yang berlatar belakang keluarga NU, yang semula mondok di Pesantren Rejoso, tetapi kemudian pindah ke Pondok Modern Gontor itu, dikenal sebagai tokoh pemimpin mahasiswa yang beraliran modernisme yang kala itu sebagai paham keagamaan, dilawankan dengan aliran tradisional, walaupun ia bukan tergolong ke dalam organisasi gerakan modernis versi Muhammadiyah tetapi dalam orientasi politiknya cenderung kepada Partai Islam Masyumi. Dengan demikian, Nurcholish Madjid memiliki identitas yang plural dalam pengertian Amartya Sen.

Dari tulisannya tentang gagasan modernisasi yang dimuat dalam tabloid *Mimbar Demokrasi*, Bandung, tersembunyi kecenderungan Nurcholish Madjid dalam membela peranan agama dalam proses perkembangan masyarakat ke arah modernitas. Posisi tokoh yang populer dipanggil dengan sebutan akrab “Cak Nur” itu mirip dengan posisi Sanusi Pane dalam penolakannya terhadap pandangan kebudayaan Sutan Takdir Alisyahbana. Ketika kebudayaan Barat mengarus kuat melalui pendidikan kolonial sejak belahan kedua abad-19, arah mata-angin kebudayaan Hindia Belanda pada dasarnya masih bersumber dari tiga kawasan, India, Cina dan Arab sebagai kawasan “*mother culture*.” Dalam tulisan selanjutnya, Cak Nur mengutip pandangan John Gardner, seorang cendekiawan yang menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dalam Kabinet John F. Kennedy itu, bahwa semua peradaban besar dunia, selalu berbasis agama. Cak Nur kemudian juga menulis tentang perbandingan antara Turki dan Jepang dalam proses modernisasi. Turki dalam proses modernisasinya telah meninggalkan Islam yang merupakan basis kebudayaan Turki. Sedangkan Jepang juga melakukan proses modernisasi tetapi tidak meninggalkan tradisi atau kebudayaan Jepang. Namun masyarakat Jepang dalam proses modernisasi jauh lebih maju daripada Turki yang nampak kehilangan arah mata-angin kebudayaannya. Dalam analisis silogisme, maka Cak Nur mengukuhkan pendapatnya bahwa guna mencapai modernitas, suatu bangsa tidak perlu meninggalkan tradisi, melainkan justru harus tetap “berkepribadian dalam kebudayaan” meminjam rumusan Bung Karno yang terkenal sebagai bagian dari paham kebangsaan itu.

Kesimpulan Cak Nur itu sebenarnya merupakan cara pandang, yang kemudian disebut sebagai “neomodernisme,” sebelum ia belajar epistemologi Fazlur Rahman, ketika kuliah di Universitas Chicago pada sekitar 1980-an. Neomodernisme adalah cara pandang yang kritis dan sekaligus kreatif terhadap baik modernisme klasik maupun tradisionalisme. Dengan cara pandang seperti itu, ia terbebas dari kecenderungan fundamentalisme yang memandang kecenderungan puritan yang melihat ke belakang, kepada posisi awal pemikiran

Islam yang berkembang dalam periode Salafi itu sebagai kebangkitan (*nahdlah*). Dalam cara pandang ini pembaharuan dilakukan justru dengan kembali kepada yang asli yang dalam konteks historis, pemikiran Islam awal sebelum mempelajari dan menerima pengaruh dari filsafat Yunani. Perkembangan pemikiran itu hanya dilakukan dengan memahami dan mencari penjelasan dari teks suci dengan pemaknaan literal.

Pada tahun 1968 di masa awal perkembangan intelektualismenya, atas permintaan kelompok pemikir muda yang tergabung dalam “*Limited Group*” yang dipengaruhi oleh ideologi Sosial-Demokrasi Jerman, Cak Nur menulis naskah “Nilai-nilai Fundamental dalam Islam,” untuk dibicarakan dalam Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Malang sebagai konsep asas perjuangan organisasi mahasiswa yang responsif terhadap paham Sosialisme-Marxis yang telah mempengaruhi HMI sebagaimana tercermin dalam konsep “Kepribadian HMI.” Gagasan tentang nilai-nilai fundamental Islam itu sebenarnya mengandung kecenderungan puritan dan Salafi dalam arti mengacu pada pembacaan teks al-Qur’an.

Tetapi pembacaan teks itu menghasilkan kesimpulan mengenai prinsip keseimbangan, yaitu keseimbangan antara iman dan akal, agama dan ilmu pengetahuan, dan antara orientasi kehidupan dunia dan akhirat. Dalam kesimpulan itu terkandung cara pandang dialektis yang secara epistemologis dirumuskan ke dalam konsep “*double-movement*” Fazlur Rahman. Dengan cara pandang itu pemikiran Nurcholishan mengenai modernisasi tidak menimbulkan persepsi bahwa ia menolak dan meninggalkan tradisi, melainkan menginterpretasikannya kembali dalam perspektif modern. Karena itu ia bukan seorang fundamentalis. Penolakannya terhadap fundamentalisme dijelaskan lebih lanjut dalam suatu tulisannya di jurnal *Prisma*, yang menegaskan bahwa fundamentalisme bukanlah solusi terhadap persoalan-persoalan Islam.

Sebelumnya, pada awal tahun 1970, dalam taushiah Halal bi Halal tiga gerakan pemuda Islam, Gerakan Pemuda Islam (GPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pelajar Islam Indonesia (PII), Nurcholish Madjid menyampaikan makalah yang berjudul

“Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat.” Dalam makalah itu pada pokoknya ia menyerukan liberalisasi dalam pemikiran Islam semacam gagasan pencerahan. Dalam pidatonya itu ia menyadari bahwa liberalisasi pemikiran akan mengandung risiko perpecahan umat. Apa yang ia sadari sejak awal itu memang segera muncul, terutama di kalangan HMI sendiri yang masih ia pimpin itu. Kritik terhadap pemikirannya meluas dan menimbulkan kesenjangan antara generasi tua dan muda, demikian pula di antara generasi muda sendiri. Dengan perkataan lain, pemikirannya telah menimbulkan kontroversi.

Kontroversi itu paling nampak pada gagasannya mengenai sekularisasi yang dipersepsikan sebagai penerimaan terhadap sekularisme, yang ia anggap sebagai sebuah ideologi tertutup. Gagasan sekularisasi itu menjadi paling kontroversial, karena gagasan itu langsung berkaitan dengan politik sebagai nampak kaitannya dengan pandangannya yang lain mengenai “Islam Yes, Partai Islam No?” yang maknanya disalahpahami juga.

Nurcholish Madjid melihat sekularisasi sebagai gejala sosiologis yang sebenarnya sudah terjadi di seluruh dunia sejak masa pencerahan abad ke-19. Sementara itu sekularisme adalah suatu ideologi yang memisahkan agama dari ilmu pengetahuan dan negara. Sebagai gejala sosiologis, sebagaimana dijelaskan oleh sosiolog Amerika Serikat, Talcott Parsons, agama bergeser dari wilayah negara ke wilayah masyarakat sipil, dengan asumsi bahwa di wilayah masyarakat, agama justru akan berkembang, karena tidak diintervensi oleh kekuatan dan kekuasaan politik, atau dengan perkataan lain memperoleh kebebasan. Karena politik itu berwatak memecah, maka masyarakat berwatak integratif. Dengan perkataan lain, liberalisasi yang menimbulkan proses diskursif dan komunikatif itu bisa berjalan tanpa harus menimbulkan disintegrasi.

Dengan demikian, maka gagasan liberalisasi pemikiran dan sekularisasi menganjurkan gagasan gerakan sosial-kultural sebagai alternatif terhadap gerakan politik. Ini juga berarti bahwa hendaknya organisasi-organisasi dakwah semacam Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan GPI-HMI-PII “kembali kepada

khitah” yang dideklarasikan resmi oleh NU pada tahun 1983 dalam muktamarnya di Situbondo. Pada waktu itu gerakan politik Islam mengalami marginalisasi sejak Masyumi dibubarkan. Bahkan ketika pemerintah Orde Baru menggantikan Masyumi dengan Parmusi dan kemudian bersama-sama dengan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), NU dan Persatuan Tarbiyatul Islam (PERTI) dan HMI sendiri sebagai organisasi non-politik digabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai Islam itu pada dasarnya tetap berperanan sebagai oposisi bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Tetapi sejak semboyan “Islam Yes, Partai Islam No?” sejumlah cendekiawan Muslim hasil HMI mulai bergabung ke dalam pemerintah Orde Baru sebagai teknokrat lingkaran kedua. Mereka juga mulai bergabung ke dalam Golkar sebagai partai pemerintah. Dari gejala inilah maka Nurcholish Madjid dengan gerakan pembaharuannya dicurigai sebagai pendukung pemerintah Orde Baru yang menimbulkan komplikasi yang menghasilkan penolakan bahkan hujatan terhadap gagasan pembaharuan.

Barangkali karena komplikasi politik terhadap gerakan pembaharuan pemikiran inilah, maka Cak Nur berusaha menghapus kesan bahwa ia menolak politik dan partai politik, dengan ikut terjun dalam kampanye Pemilu 1977 yang mendukung PPP dengan tema “memompa ban gembos.” Tetapi arus masuknya alumni HMI yang mewakili generasi cendekiawan Muslim ke dalam birokrasi dan partai politik, yaitu Golkar, tidak terhentikan. Pada awalnya tampil Mar’ie Mohammad sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pembangunan IV. Nurcholish Madjid mendukung tampilnya tokoh cendekiawan alumni HMI yang ia citrakan sebagai “*Mister Clean*” itu, yang bisa menjadi tokoh teladan seorang negarawan Muslim. Tetapi ia sendiri tidak berusaha masuk ke dalam pemerintahan, bahkan ia mewacanakan gagasan demokrasi dengan ciri adanya lembaga oposisi loyal. Namun, kemudian setelah terjadinya proses demokratisasi sejak 1998, ia memperoleh dorongan untuk mencalonkan diri sebagai presiden RI, melalui Golkar walaupun terhenti karena faktor “kekurangan gizi.” Gejala yang ia alami

itu merupakan awal dari wacana mengenai “politik uang” yang mencederai gagasan ideal demokrasi.

Masuknya cendekiawan Muslim ke dalam partai politik non-Islam yang dalam pengertian populer disebut “partai sekuler” mendapat dukungan masyarakat Muslim. Tetapi gejala itu tidak bisa disebut sebagai proses sekularisasi, dalam arti penolakan terhadap agama, khususnya Islam, dan mengeksklusi kepentingan dan aspirasi umat beragama. Bahkan yang sebaliknya telah terjadi, sebagaimana dikatakan oleh Yudi Latif, dalam tesis masternya, adalah proses Islamisasi partai-partai sekuler. Inilah yang sebenarnya dimaksud oleh Nurcholish Madjid sebagai “Islam Yes, Partai Islam No?” dari sudut pandangan neomodernis yang dialektis. Penolakan terhadap partai politik Islam tidak berarti penolakan terhadap Islam, karena partai-partai sekuler tidak mengikuti pandangan liberalisme politik gagasan John Rawls, yaitu membendung wacana agama di ruang publik. Tetapi yang dimaksud oleh Rawls sebenarnya adalah membendung agama sebagai doktrin komprehensif yang tertutup atau ideologi tertutup menurut istilah Nurcholish Madjid. Pada satu pihak, ia sendiri juga menolak sekularisme karena telah menjadi ideologi tertutup, tetapi pada pihak lain, ia menganjurkan sekularisasi atau melihat proses sekularisasi sebagai keniscayaan.

Nurcholish Madjid menjelaskan sekularisasi sebagai proses profanisasi sesuatu yang semula disucikan, atau dilegitimasi oleh agama, seperti Islam sebagai ideologi tertutup, Islam politik dan bahkan partai Islam. Ini tidak berarti ia menolak partai Islam dan Islam politik. Hanya saja keduanya bukanlah sesuatu yang suci (*sacred*). Dengan demikian maka sekularisasi adalah membedakan yang *sacred* dengan yang *profan*. Baginya yang suci hanyalah Allah. Sedangkan yang bukan Allah adalah yang profan. Ini sebenarnya adalah puritanisme model Wahhabisme juga yang secara rasional dirumuskan oleh Ibn Taymiyah. Cak Nur sering mengemukakan suatu pandangan Ibn Taymiyah yang pernah mengatakan bahwa kekuasaan non-Muslim yang adil lebih baik dari kekuasaan Muslim yang tidak adil. Ini adalah sekularisasi atau profanosasi kekuasaan Islam. Yang suci adalah yang benar. Tetapi tidak ada kebenaran yang

mutlak, kecuali Allah. Karena itu, setiap klaim kebenaran tidak boleh dilegitimasi atau disucikan dengan agama.

Maka liberalisasi berarti membuka pikiran dan ilmu pengetahuan. Menutup kebenaran dengan membatasi pengetahuan adalah penyembunyian kebenaran. Dan membendung pengetahuan, yang dalam ajaran Hindu menolak Veda keempat, yaitu Veda yang disebut Veda Atharva, menurut Dewa Siwa, berarti mendustakan atau menutup kebenaran. Dan dalam ajaran Basudewa Krishna dalam epik Mahabharata, jalan untuk mengetahui kebenaran, pertama-tama, adalah pengetahuan.

Tetapi pengetahuan saja tidak mencukupi, karena sendi kebenaran ada lima. Pengetahuan sebagai sendi pertama kebenaran harus diikuti dengan cinta sebagai sendi kedua, yaitu cinta kepada Allah yang berarti cinta kepada Kebenaran yang diwujudkan dengan cinta kepada sesama manusia (filantropi). Sendi ketiga adalah keadilan, terutama keadilan yang harus ditegakkan oleh hakim atau hukum, penguasa atau negara dan orang kaya yang harus menolong yang miskin dan lemah. Sendi keempat kebenaran adalah kebaktian, pengabdian atau menepati kewajiban. Dalam ajaran Hindu, melalui ujar Dewa Siwa, menjalankan kewajiban adalah bagian dari meditasi, yang dalam ajaran Islam dilakukan dengan zikir dan doa kepada Tuhan dan dilakukan melalui jihad sebagai perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Sendi kelima adalah kesabaran. Dalam surat al-‘Ashr, anjuran untuk saling berwasiat tentang kebenaran (*al-haqq*) bergandengan dengan anjuran untuk saling berwasiat atau berwanti-wanti tentang kesabaran, yang menurut anjuran Basudewa Krishna, kesabaran berarti kekuatan dan ketegaran untuk menghadapi segala persoalan, rintangan yang merupakan cobaan.

Pembaharuan pemikiran Islam yang dikemukakan dalam pidato tausiah Halal bi halal 1970, dikatakan ulang oleh Nurcholish Madjid dalam Pidato Kebudayaan di Taman Ismail Marzuki tahun 1972, sebagai penyegaran paham keagamaan yang dikatakan ulang dalam tulisan cendekiawan muda Ulil Abhsar-Abdalla dalam tulisan kontroversialnya di Harian *Kompas* tahun 2002. Pembaharuan bagi

kedua cendekiawan Muslim itu bukanlah berarti kembali kepada yang lebih asli atau lebih awal. Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah adalah aliran yang menghargai perkembangan ilmu pengetahuan yang senantiasa diperbaharui melalui *tafaqquh fi al-din* (Lihat Q 9: 122). Pembaharuan pemikiran Islam dalam pemikiran Nurcholish Madjid adalah mengacu kepada *the idea of progress* (gagasan kemajuan) sebagai usaha mencari kebenaran.

Di masa Orde Baru telah terjadi perkembangan pemikiran kebangsaan yang mengundang reaksi Nurcholish Madjid, yaitu menjadikan Pancasila sebagai ideologi tertutup, ketika Pancasila ditetapkan sebagai asas tunggal. Tindakan ini sama dengan yang dilakukan oleh Francis Fukuyama yang mendeklarasikan Demokrasi Liberal dan Kapitalisme sebagai puncak pemikiran umat manusia di bidang politik kenegaraan dengan istilah "The End of History and The Last Man." Bagi Daniel Bell Sr, ini berarti berakhirnya gagasan-gagasan politik besar. Ketika Pancasila ditetapkan sebagai ideologi tertutup, maka Pancasila dibendung untuk berkembang. Padahal Pancasila barulah merupakan gagasan besar, tetapi belum dikembangkan secara filosofis dan sebagai ilmu pengetahuan. Dan karena itu, Pancasila belum merupakan paradigma.

Sejak 1999, telah terjadi proses reformasi yang intinya adalah demokratisasi. Sebagaimana Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945 yang merupakan awal dari proses liberalisasi politik, reformasi 1999 telah melahirkan partai-partai politik baru, termasuk sejumlah partai Islam. Gejala ini berarti pembenaran empiris dari semboyan "Islam Yes, Partai Islam (juga) Yes" yang mula-mula dinyatakan oleh Sulastomo, Ismail Hasan Metareum, dan Endang Saifuddin Anshari dan pada masa Reformasi dibela oleh Halim Fahmi Zarkasji, pimpinan Pondok Modern Gontor. Tetapi masalahnya adalah bahwa cendekiawan Muslim generasi kontemporer telah mengalami diaspora dengan memasuki tidak saja Golkar, tetapi juga partai-partai sekuler lain semacam Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) atau Partai Nasional Demokrasi (Nasdem). Partai-partai Islam sendiri dan partai-partai berbasis gerakan sosial Islam seperti Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Pemilu 2014 telah mendukung calon-calon partai sekuler. Namun diaspora itu mengandung unsur Islamisasi partai-partai sekuler dan Islamisasi pemerintahan pilihan rakyat.

Dalam pandangan Kuntowidjojo, cendekiawan Muslim yang berbasis di Yogya, dalam perspektif sejarah, Islam pada mulanya mengalami marginalisasi. Dalam posisi marginal yang bisa dilakukan adalah melakukan oposisi. Namun, dalam proses sekularisasi, Islam mengalami integrasi dan menjadi unsur yang memerintah. Dalam integrasi itu terjadi juga proses Islamisasi, sebagaimana dikatakan oleh Yudi Latif yang dikukuhkan oleh M.C. Ricklefs, seorang sarjana sejarah dan urusan-urusan Indonesia.

Nurcholish Madjid sendiri dikenal dengan konsep integrasi segitiga, Keislaman, Kemoderanan dan Keindonesiaan, sebagai hasil dari proses liberalisasi dan sekularisasi yang dikembangkan melalui epistemologi neomodernisme yang dialektis itu. Nurcholish Madjid bukanlah pendiri Paramadina. Tetapi Paramadina dibentuk sebagai lembaga instrumen penyebaran pembaharuan pemikiran Nurcholish Madjid dan cendekiawan Muslim berpikiran liberal yang pada tahun 1970 diharapkan lahir.

Dalam pengembangan dan penyebaran pemikirannya, Nurcholish Madjid tetap setia pada teks. Tetapi anjuran liberalisasi dan sekularisasi pemikiran Islam telah menimbulkan dampak meninggalkan teks pada generasi muda liberal harapannya. Dewasa ini yang berkembang pesat adalah studi Islam yang menjadikan Islam sebagai obyek kajian. Namun pemikiran Islam yang menandai Keislaman, tidak berkembang. Kemoderanan, dalam pandangan Nurcholish Madjid, diartikan sebagai rasionalitas yang diwujudkan dalam pengetahuan. Dalam perspektif ini, umat Islam telah mengalami kemajuan, sebagaimana ditunjukkan dalam perkembangan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan lahirnya generasi cendekiawan Muslim yang nampak mendominasi wacana pemikiran dewasa ini. Sedangkan Keindonesiaan dimaksudkan sebagai identitas yang bercirikan karakter bangsa, atau kepribadian bangsa yang merupakan identitas Keindonesiaan. Dewasa ini, Islam

Indonesia dinilai sebagai model masyarakat yang berbeda dengan Islam di kawasan pusat dunia Islam di Timur Tengah. Cirinya adalah pluralisme, kesetaraan gender dan demokrasi yang merupakan tema pemikiran pasca Nurcholish Madjid. Tetapi sebenarnya, ketiga ciri Keindonesiaan itu masih berada dalam proses. Bahkan sebagai akibat dari Westernisasi yang sekarang disebut sebagai globalisasi itu, bangsa Indonesia telah mengalami erosi kepribadian yang menimbulkan krisis kepribadian, ibarat Drupadi yang diciptakan dari api dalam kisah Mahabharata berdiri di tepi jurang seakan-akan akan melakukannya bunuh diri, tetapi sebenarnya sedang mempertanyakan “*sangkan paraning dumadi*” atau agama, yang menurut Basudewa Krishna, hanya bisa diketahui ketika ia mengetahui jati dirinya yang dalam bahasa Islam “Barangsiapa mengetahui jati dirinya, maka ia akan menemukan Tuhannya” (*Man ‘arafa nafsahu, faqad ‘arafa Rabbahu*).

Baik Keislaman maupun Keindonesiaan dewasa ini masih berada dalam proses awal. Pemikiran Nurcholish Madjid telah berkembang dalam kurun waktu empat dasawarsa 1968-2006. Tetapi pemikiran Nurcholish Madjid itu sendiri sebenarnya masih merupakan wacana yang belum selesai. Dalam disertasi Dr. Budhy Munawar-Rachman dikatakan bahwa gagasan pembaruan pemikiran Islam Nurcholish Madjid dimulai dengan anjuran liberalisasi, sekularisasi dan *the idea of progress* tetapi kesimpulan terakhirnya adalah pemikiran Islam yang inklusif.

Kemandegan pemikiran Islam itu kini memerlukan tindakan “membuka pintu ijtihad.” Pembukaan kembali pintu ijtihad itu harus mengingat bahwa pembukaan pintu ijtihad awal abad ke-20 telah menghasilkan gagasan modernisme, maka pintu ijtihad abad ke-21 harus menghasilkan pemikiran inklusif. Pancasila sendiri dalam pandangan Bung Karno dalam Pidato 1 Juni, 1945 pada dasarnya adalah suatu gagasan persatuan yang dalam pemikiran Sutan Sjahrir cenderung kepada otoritarianisme. Liberalisasi pemikiran tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka versi Nurcholish Madjid dalam liberalisasi abad ke-21 akan digantikan dengan gagasan Pancasila sebagai pluralisme yang mengandung multi identitas.

Yayasan Paramadina, yang didirikan pada 1986, sebenarnya dimaksudkan sebagai lembaga yang mengemban misi pembaruan pemikiran Islam Nurcholish Madjid. Namun karena persoalan eksistensi, Universitas Paramadina, sebagaimana universitas-universitas lain, baik swasta maupun negeri, telah mengalami kontaminasi pasar. Tetapi selain Yayasan Paramadina, masih ada Nurcholish Madjid Society (NCMS), yang didirikan pada 2008, sebagai lembaga yang mempelajari dan mengembangkan gagasan-gagasan Nurcholish Madjid.

Apabila pemikiran Nurcholish Madjid yang menjadi acuan, maka sila Keislaman harus diwujudkan dengan pengembangan pemikiran Islam, sila Kemoderanan akan diwujudkan dengan pengembangan gagasan tentang kemajuan. Sedangkan sila Keindonesiaan diwujudkan dengan pengembangan model Islam Indonesia yang bercirikan pluralisme, kesetaraan gender dan demokrasi yang substansial. ❖

M. Dawam Rahadjo adalah Direktur Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Jakarta. Ia adalah salah seorang cendekiawan Muslim yang gigih membela kebebasan beragama di Indonesia.